Radar Bali

ADD

Rawan Penyimpangan, Harus Dimonitor

SEMARAPURA- Tahun ini, anggaran masuk ke masing-masing desa termasuk besar. Selain dana ADD (Alokasi Dana Desa), juga ada anggaran dari pemerintah pusat. Untuk di Klungkung, seperti dikatakan Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta, anggaran pemerintah pusat mencapai Rp 15 miliar turun ke Kabupaten Klungkung.

"Iya, tahun ini Klungkung dapat Rp 15 miliar. Itu dibagi untuk desa-desa di Klungkung," kata Kasta. Melihat besaran anggaran pusat itu, pihaknya memperkirakan, masing-masing desa bakal mengelola anggaran besar. Mengingat, untuk ADD, setiap desa di Klungkung minimal mendapatkan ADD sebesar Rp 700 juta. Jika ditambah anggaran dari pusat, bisa tembus Rp 1 miliar. "Bayangkan, desa mengelola anggaran Rp 1 miliar. Sangat besar ini, harus hati-hati," saran Wakil Bupati asal Desa Akah, Klungkung, ini.

Melihat anggaran itu, pihaknya khawatir, desa tidak mampu mengelola. Sangat riskan dari segi sumber daya manusia (SDM), sehingga rawan terjadinya penyimpangan. Artinya, bukan hanya karena memang ada niat, melainkan juga bisa karena ketidak tahuan. Untuk itu, Pemkab Klungkung, tegas politikus Partai Gerindra, ini bakal terus memantau penggunaan anggaran itu. "Harus rutin ada monev (monitoring dan evaluasi)," tegas Kasta, di sela-sela Monev di Desa Bumbungan, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, Selasa (7/4) kemarin. Saat monev yang digelar di Kantor Desa Bumbungan, Kasta juga menyarankan supaya aparat pemerintah di tingkat desa harus bekerja didasari aturan. **(wan/gup)**

Edisi : Rabu, 8 April 2015

Hal : 25

Radar Bali

KASUS DKP TABANAN

Tiga Staf DKP Dicerca Soal Penyerahan Uang

TABANAN - Meski terkesan lambat, namun penyidikan kasus dugaan pemerasan CPNS di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertaman-an (DKP) Pemkab Tabanan terus bergulir. Kali ini giliran tiga orang staf DKP yang diperiksa Kajari Tabanan. Ketiga staf DKP itu ditanya soal penyerahan uang kepada oknum pejabat DKP, kemarin (7/4).

Kasipidsus Kajari Tabanan Fathur Rohman mengatakan bahwa kasus dugaan pemerasan di lingkungan DKP Pemkab Tabanan itu terus berjalan. Bahkan, saat ini pihaknya mengaku tengah melakukan penyempurnaan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi. Setidaknya tim penyidik telah memanggil puluhan saksi yang berasal dari staf DKP, staf BKD, dan orang umum. "Saat ini kami tengah melaku-kan penyempurnaan alat bukti," ucapnya ▩

▸ Baca **Tiga...** Hal 31

Hari Ini Panggil Tiga Orang Lagi

■ TIGA

Sambungan dari hal 21

Dalam pemeriksaan kemarin tim penyidik sejat-inya memanggil empat orang saksi yakni tiga orang staf DKP dan satu orang staf Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Namun, yang datang hanya tiga orang staf DKP sementara satu staf BKD berhalangan hadir. Ketiga staf DKP yang memenuhi panggilan tim penyidik Kajari tersebut yakni I Nyoman S, Ni Ketut M, I Wayan S. Sedangkan staf BKD yang berinisial Wn dipanggil tidak hadir lantaran sakit. "Hari ini (kemarin, Red) kita panggil empat orang, namun satu orang staf BKD berhalangan lantaran sakit," ucapnya.

Para saksi itu dicerca sekitar 23 sampai 32 pertanyaan, mereka diperiksa sejak pukul 09.00 hingga pukul 15.00. "Tim penyidik kami menanyakan soal kesaksian mereka seputar adanya dugaan penyer-ahan uang kepada oknum pejabat DKP," ucapnya. Ditanya lebih jauh terkait hasil pemeriksaan, sep-erti biasa pejabat asal Bojonegoro, itu mengelak secara halus. "Kalau soal materi, kita belum bisa publikasikan, mohon maaf *ya*," kelit Fathur.

Selanjutnya masih menurut Fathur, Rabu hari ini (8/4) pihaknya akan memanggil kembali tiga orang saksi yakni I Nyoman S, Ajik S, dan I Wayan A. Sedangkan untuk Kamis (9/4) pihak kejari akan menghadirkan dua orang saksi yakni I Wayan S dan mantan Kadis DKP IGN Supanji untuk dimintai keterangan tambahan. "Besok (Kamis, 9/4) kami akan panggil Pak Supanji untuk dimintai keterangan tambahan," ungkap Fathur. **(gin/yes)**

Edisi : Rabu, 8 April 2015

Hal : 21

Radar Bali

Juga Dalami Kasus PDAM Karangasem

SELAIN kasus dugaan korupsi di Pemkot Denpasar, Kejati Bali kemarin juga mendalami kasus dugaan korupsi di PDAM Karangasem. Tim jaksa yang menangani adalah Jaksa Rochida, Agus Jemaat, dan Raka Arimbawa. Ada dua saksi yang diperiksa kemarin (7/4). Berdasarkan daftar hadir di Kejati Bali, mereka yang diperiksa adalah Nyoman Sukarni dan Dharmayanti.

▸ Baca **Juga...** Hal 31

FOTO-FOTO: MIFTAHUDDIN/RADAR BALI

DIPERIKSA: Nyoman Sukarni, salah satu pejabat PDAM Karangasem saat menjalani pemeriksaan di Kejati Bali. Dharmayanti (insert) usai diperiksa, kemarin.

Tensi Tinggi, Mustiara Batal Diperiksa

■ **JUGA**

Sambungan dari hal 21

Dua orang ini disebut - sebut sebagai pejabat Divisi Pengadaan. "Kasusnya sudah didalami sejak dua minggu lalu. Sudah banyak saksi yang diperiksa. Hari ini dua orang," ungkap sumber koran ini.

Saksi ini diperiksa secara mendalam, bahkan sejak pagi sampai pukul 15.00. pemeriksaan dilakukan di ruang terpisah. Dengan mendalami proses pengadaan - pengadaan di PDAM Gianyar.

Seperti apa awal kasus ini? Berdasarkan informasi yang dirangkum ada laporan dari masyarakat yang membeberkan keburukan Dirut PDAM Karangasem I Gede Baktiyasa. Bahkan, juga dibeberkan beberapa kekayaannya. Dan, beberapa dugaan masalah di PDAM Karangasem.

"Laporan itu masuk ke kejati, kemudian didalami dengan puldata. Setelah itu naik menjadi penyelidikan," imbuhnya.

Atas kasus ini Dirut PDAM Karangasem Baktiyasa belum bisa dikonfirmasi. Ponselnya ketika dihubungi tidak aktif. Namun, Kasipenkum Kejati Bali Ashari Kurniawan membenarkan. "*Ya,* kami kejati memang sedang mendalami kasus dugaan korupsi di PDAM Karangasem," jelasnya.

Dan, Ashari juga kemarin menjelaskan kejati sebenarnya ada rencana untuk memeriksa saksi penting dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan kampus Undiksha. Yang akan diperiksa rencananya adalah Mustiara, sebagai calo lahan yang juga pejabat Pemkab Singaraja. Mustiara menjabat sebagai sekretaris di Dinas Capil. "Memang ada rencana untuk memeriksa saksi Mustiara dalam kasus Undiksha. Namun, tadi sopirnya membawa surat menyatakan Mustiara dalam kondisi sakit dan tensinya tinggi," ungkapnya. **(art/yes)**

Edisi : Rabu, 8 April 2015

Hal : 21

Radar Bali

Kejati Bali Kejar Mafia Izin

Mereka yang Diperiksa Kejati*

1. Kepala Badan Perizinan Pemkot Denpasar AA Ngurah Rai

2. Kadis DTRP (Dinas Tata Ruang dan Perumahan) Kota Denpasar Made KusumaDiputra

3. Kadis penda Denpasar Dewa Nyoman Semadi

*) Terkait kasus dugaan permainan izin untuk reklame, LED TV dan Billboard di wilayah Denpasar.

GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI

Tiga Kepala SKPD Pemkot Diperiksa

DENPASAR - Beberapa kasus dugaan korupsi bermunculan di lingkungan Pemkot Denpasar. Setelah pendalaman temuan BPK RI dan pelimpahan kasus proyek pavingisasi Jalan Gajah Mada yang ditangani Kejari dan Polresta Denpasar, sejak dua pekan lalu Kejati Bali mendalami dugaan adanya mafia izin. Bahkan, tiga kepala dinas (Kadis) sudah diperiksa dalam kasus ini.

Informasi yang dirangkum koran ini, kasus yang diusut oleh Kejati Bali adalah dugaan mafia izin di pemkot. Khususnya permainan izin untuk reklame, LED TV, dan billboard. Kasus ini mencuri perhatian Kejati Bali, setelah ada laporan masyarakat dan sempat gencarnya media memberitakan kasus permainan izin LED TV dan billboard.

"Sudah sekitar dua minggu lebih pengumpulan data (puldata). Akhirnya, sudah masuk penyelidikan. Dan, tim jaksanya juga sudah ditunjuk," ungkap sumber koran ini.

Dia mengatakan yang ditunjuk menjadi tim jaksa adalah Ketua Made Subawa, anggota Dayu Sulasmi dan Juanedi Tandi. Tim jaksa ini sudah memeriksa beberapa pejabat pemkot dan beberapa saksi. Namun, yang menarik ada tiga pejabat teras pemkot yang sudah ■

▸ Baca **Kejati...** Hal 31

Edisi : Rabu, 8 April 2015

Hal : 21

Radar Bali

sambungan..

Diperiksa Selama Dua Setengah Jam

■ KEJATI

Sambungan dari hal 21

"digojlok" di Kejati Bali. "Kalau *nggak* salah tiga Kadis sudah diperiksa," ungkapnya.

Dia mengatakan, seingatnya Kepala Badan Perizinan Pemkot Denpasar AA Ngurah Rai Soeriawan, Kadis DTRP (Dinas Tata Ruang dan Perumahan) Kota Denpasar Made Kusuma Diputra, dan Kadispenda Denpasar Dewa Nyoman Semadi yang sudah diperiksa. "Kalau Rai Soeriawan sudah diperiksa Senin (6/4), Kadispenda Semadi dan Kadis DTRP Kusuma Diputra tadi (kemarin, Red)," ungkapnya.

Seperti apa kira - kira pola permainan izinnya? Dia mengatakan ada beberapa kemungkinan yang sedang dibidik. Misalnya terkait dengan mafia perizinan reklame, lantaran ada indikasi permainan dana ketika memohon izin reklame. Juga ditelusuri adanya pajak reklame yang masuk ke Pemkot. "Seputaran mafia reklame, LED TV, atau billboard," lanjutnya.

Kasipenkum Kejati Bali Ashari Kurniawan membenarkan pihaknya sedang menangani kasus dugaan permainan izin reklame di Pemkot Denpasar. "Intinya memang benar kami sedang menangani. Siapa yang sudah diperiksa kami tidak bisa jelaskan, lantaran memang masih penyelidikan. Dan, benar memang Pak Made Subawa ketua tim jaksanya," jelas Ashari.

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar AA Gde Rai Soeriawan ketika dikonfirmasi membenarkan pemeriksaan tersebut. "*Ya*, saya bersama Pak Kusuma Diputra dan Pak Nyoman Semadi diperiksa Kejati Bali masalah penataan reklame dan billboard," ujarnya.

Pemeriksaan dirinya beserta dua pimpinan SKPD oleh Kejari Denpasar karena ketiganya yang bertanggung jawab masalah tersebut. "Karena kami bertiga ada kaitannya dengan hal tersebut, makanya kami bertiga dimintai keterangan," ujarnya.

Disinggung mengenai pertanyaan yang dilontarkan pihak Kejati Bali dalam kaitannya soal penataan reklame dan billboard tersebut, dirinya enggan membeberkan hal tersebut. "Tidak ada pertanyaan, modelnya hanya dialog. Ketika saya ditanya mengenai aturan yang kami punya, *ya* kami jelaskan masalah itu kepada pihak kejati," terangnya.

Sementara itu, Kepala DTRP Denpasar Made Kusumadi Putra juga membenarkan soal masalah pemeriksaannya tersebut. "*Ya*, saya dimintai keterangan soal aturan dan masalah rekomendasi pelaksanaan reklame saja, tidak ada yang lain. Kami hanya diperiksa dua setengah jam saja," kilahnya.

Sementara Kepala Dinas Pendapatan Kota Denpasar Dewa Nyoman Semadi, berkali-kali dihubungi tidak ada jawaban sama sekali. **(art/hen/yes)**

2

Edisi : Rabu, 8 April 2015

Hal : 21

Radar Bali

Puluhan Hektare Lahan Basah Raib

Tergusur Akomodasi Wisata

MANGUPURA – Komitmen Pemkab Badung untuk mengerem laju alih fungsi lahan sepertinya hanya basa-basi saja. Buktinya, alih fungsi lahan di Badung kian masif dan merajalela. Fakta maraknya alih fungsi lahan ini dibeberkan Wabup Bupati Badung Made Sudiana. Kepada awak media di Puspem Badung kemarin (7/4) menuturkan, berdasar data time series lima tahun terakhir, sebanyak 47 hektare lahan kena imbas dari alih fungsi lahan itu.

Jumlah ini tentu saja masih belum 100 persen akurat. Pasalnya, pantauan koran ini pembangunan di lahan basah dan produktif masih terus berlangsung. Yang paling parah ada di Kecamatan Kuta Utara, seperti Desa Canggu dan Kerobokan. "Berdasarkan data time series lima tahun terakhir, rata-rata alih fungsi lahan mencapai 47 hektare," papar Sudiana.

Namun demikian, Sudiana mengklaim kondisi ini jauh berkurang dibandingkan tahun 2003-2005 yang mencapai 101 hektare. Sudiana juga mengklaim telah mengimbangi alih fungsi lahan dengan membuka lahan pertanian baru seluas kurang lebih 101 hektare di Subak Pangsut Sari, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang. Bahkan, Sudiana menyebut pembukaan lahan pertanian baru juga dibarengi dengan pembuatan terowongan air sepanjang hampir 8 km secara swakelola oleh masyarakat.

"Dengan pembukaan lahan pertanian baru tersebut, luas lahan sawah di kabupaten Badung mencapai Rp 9.984 hektare," paparnya.

Soal maraknya alih fungsi lahan yang masih terus berlangsung, Sudiana tidak menampik. Politisi Golkar itu mengakui tidak bisa menahan alih fungsi lahan 100 persen. Artinya tetap saja walaupun segala cara sudah dilakukan untuk menangkal alih fungsi lahan tetap ada saja kawasan yang terjamah. terutama di daerah yang berkembang cukup pesat pertumbuhan pariwisatanya. "Sekarang sudah bisa kita kendalikan walaupun tidak 100 persen, artinya masih ada peralihan fungis lahan. Cuma kalau kita lihat saat ini tidak separah dulu," klaim pria berkumis tipis ini.

Sudiana berdalih maraknya alih fungsi lahan antara pertanian dan pariwisata lebih menjanjikan pariwisata. Hal itu yang menurutnya menjadi tantangan terbesar. Sudiana hanya berjanji ke depan segala aktivitas pembangunan yang menjamah pertanian pemerintah tak akan diberikan toleransi lagi. Namun bila kawasan itu memungkinkan untuk terbangun tinggal diarahkan agar pembangunan itu berjalan sesuai dengan perancanaan. **(san/han)**

Edisi : Rabu, 8 April 2015

Hal : 24

Radar Bali

Rehab Stadion Amburadul

EKA PRASETYA/RADAR BALI

TEMUKAN MASALAH: Bupati Buleleng Putu Agus Sudarnyana (dua dari kanan) saat sidak rehab Stadional Mayor Metra.

Agus Suradnyana Mencak-mencak

SINGARAJA – Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana dibuat mencak-mencak saat melakukan inspeksi mendadak (sidak), di Stadion Mayor Metra. Gara-garanya rehabilitasi stadion tak sesuai dengan rencana kerja.

Dari hasil sidak yang dilakukan, Agus menemukan sejumlah hal yang dianggap tak sesuai dengan perencanaan. Diantaranya kondisi pasir di lintasan atletik, serta rumput di lapangan sepak bola.

Pasir di lintasan atletik, dianggap tak sesuai dengan perencanaan, dan rentan menyebabkan atlet terpeleset. Karena butiran-butiran pasir masih terlalu besar. Sementara rumput yang digunakan di lapangan sepak bola, dianggap jauh dari kata layak. "Jangan-jangan ini rumput liar yang ditanam. Ini pengawasannya bagaimana. Tolong Dinas Pendidikan agar lebih diperhatikan lagi pengawasannya, termasuk konsultan pengawas juga, biar serius," kata Agus.

> **"Jangan-jangan ini rumput liar yang ditanam. Ini pengawasannya bagaimana. Tolong Dinas Pendidikan agar lebih memperhatikan lagi pengawasannya, termasuk konsultan pengawas juga, biar serius."**
>
> **PUTU AGUS SURADNYANA**
> Bupati Buleleng

Mantan Ketua Komisi III DPRD Bali itu pun tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia curiga jika proyek-proyek lainnya, berpotensi tak sesuai dengan rencana kerja. "Pokoknya saya sidak terus ini. Mana saja yang direhab, saya cek betul. Kontraktor jangan main-main sama saya. Saya ini orang arsitektur, paham hal-hal seperti ini," imbuhnya.

Proyek rehab Stadion Mayor Metra sendiri, mendapat gelontoran dana hingga Rp 2,2 miliar. Namun belum mampu menyentuh perbaikan secara menyeluruh. Perbaikan hanya menyentuh perbaikan lintasan atletik, lapangan sepakbola, serta pembuatan toilet. **(eps/gup)**

Edisi : Rabu, 8 April 2015
Hal : 29